



PERAN PROVINSI DALAM
PENINGKATAN KUALITAS

SIPP DAN SP4N-LAPOR

JAKARTA
25 SEPTEMBER 2019



Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pilih Lokasi

Cari informasi pelayanan pub



Cari Berdasarkan Peta  Pilih Lokasi

SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.



Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPP Pemerintah Daerah

Pengelola SIPP Kementerian PANRB telah menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan rekomendasi atas pengelolaan SIPP setiap Pemerintah Daerah di tahun 2018 melalui surat **B/63/M.PP.04/2019**

Fokus Evaluasi

1. Kepemilikan akun
2. Keaktifan akun
3. Pengisian profil instansi
4. Pengisian data jenis layanan
5. Kualitas pengisian data jenis layanan

**PENGELOLAAN SP4N-LAPOR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018**



Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Pemerintah Daerah

Pengelola SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB telah menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan rekomendasi atas pengelolaan SP4N-LAPOR! setiap Pemerintah Daerah di tahun 2018 melalui surat **B/51/M.PP.03/2019**

Fokus Evaluasi

1. Kepemilikan SK
2. Keaktifan akun
3. Jumlah Laporan
4. Persentase laporan yang ditindaklanjuti
5. Rata-rata tindak lanjut (hari)
6. Kualitas tindak lanjut

Tindak Lanjut yang Diharapkan

- ▶ Pemerintah Provinsi **meneruskan hasil evaluasi** kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
- ▶ **Mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota** dalam menindaklanjuti rekomendasi dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian PANRB
- ▶ Melakukan **monitoring dan evaluasi** terhadap pengelolaan SIPP dan SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala
- ▶ Menyusun **rencana aksi** pengelolaan SIPP dan SP4N-LAPOR! di tingkat Provinsi
- ▶ Membantu **melakukan sosialisasi** SIPP dan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat

Status Keterhubungan per Provinsi

Provinsi	Total Pemerintah Daerah	Memiliki SK Pengelola Pengaduan	Pengelolaan SIPP yang Baik
Provinsi Aceh	24	12	4
Provinsi Bengkulu	11	10	2
Provinsi Jambi	12	10	4
Provinsi Bangka Belitung	8	8	7
Provinsi Kepulauan Riau	8	7	3
Provinsi Lampung	16	9	4
Provinsi Riau	13	11	7
Provinsi Sumatera Barat	20	19	7
Provinsi Sumatera Selatan	18	18	2
Provinsi Sumatera Utara	34	22	6
Provinsi Banten	9	4	7
Provinsi DI Yogyakarta	6	3	6
Provinsi DKI Jakarta	1 (1 Provinsi + Daerah Administratif)	0	0
Provinsi Jawa Barat	28	20	19
Provinsi Jawa Tengah	36	24	9
Provinsi Jawa Timur	39	36	21

Status Keterhubungan per Provinsi

Provinsi	Total Pemerintah Daerah	Memiliki SK Pengelola Pengaduan	Pengelolaan SIPP yang Baik
Provinsi Kalimantan Barat	15	11	10
Provinsi Kalimantan Selatan	14	14	8
Provinsi Kalimantan Tengah	15	13	6
Provinsi Kalimantan Timur	11	6	6
Provinsi Kalimantan Utara	6	5	5
Provinsi Bali	10	8	8
Provinsi Nusa Tenggara Barat	11	7	1
Provinsi Nusa Tenggara Timur	23	9	1
Provinsi Gorontalo	7	6	4
Provinsi Sulawesi Barat	7	5	2
Provinsi Sulawesi Selatan	25	23	2
Provinsi Sulawesi Tengah	14	7	0
Provinsi Sulawesi Tenggara	18	11	2
Provinsi Sulawesi Utara	16	9	6
Provinsi Maluku	12	5	5
Provinsi Maluku Utara	11	5	1
Provinsi Papua	30	1	1
Provinsi Papua Barat	14	1	0



KOMPETISI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang baik, telah dilaksanakan **Kompetisi SP4N Tahun 2018** dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2019

1. Terdiri dari tahap seleksi berkas dan wawancara
2. Akan diambil TOP 25 dan TOP 10 Pengelola SP4N terbaik